



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAMUJU

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM – PTSP)**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH.M.Si

Jabatan : BUPATI MAMUJU

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,



Hj.SITI SUTINAH SUHARDI, SH.M.Si

Pihak Pertama,



Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	340 Milyar/Rupiah
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	IKM	90
3	Terselenggaranya Birokrasi DPM-PTSP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	B

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.217.692.132,00	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 33.826.000,00	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 2.000.000,00	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 62.054.240,00	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 546.999.200,00	APBD
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 47.377.000,00	APBD
	Jumlah Total	Rp. 3.909.948.572,00	

Mamuju, Januari 2023

Bupati Mamuju,



Hj. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH.M.Si

Kepala Dinas DPM-PTSP,



Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASLIAH, SE

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Pihak Pertama,

HASLIAH, SE

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
BIDANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MAMUJU

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya Iklim yang Kondusif untuk Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal	100 %
2	Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peningkatan Investor	44 Investor
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	50%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 23.826.000,00	APBD
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Rp. 23.826.000,00	APBD
II	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 2.000.000,00	APBD
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.000.000,00	APBD
III	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 532.100.000,00	APBN
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 532.100.000,00	APBN
	JUMLAH	Rp. 557.926.000,00	

Kepala DPM-PTSP,


Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Mamuju, Januari 2023

Kepala Bidang Penanaman Modal


HASLIAH, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PERIZINAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIR, S.Pi.M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya di sebut pihak kedua

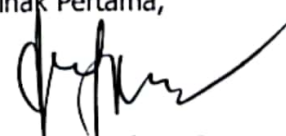
Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Pihak Pertama,

SUDIR, S.Pi.M.Si

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN MAMUJU

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	50%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 39.240.600,00	APBD
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.240.600,00	APBD
II	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 14.899.200,00	APBD
2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.899.200,00	APBD
	Jumlah	Rp. 54.139.800,00	

Kepala DPM-PTSP,


Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Mamuju, Januari 2023

Kepala Bidang Perizinan


SUDIR, S.Pi.M.Si

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Jabatan : Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si


Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
KABUPATEN MAMUJU

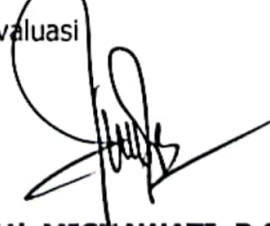
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 22.813.640,00	APBD
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.813.640,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 22.813.640,00	

Kepala DPM-PTSP,


Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Mamuju, Januari 2023
Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi


Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG INFORMASI DATA DAN PELAPORAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SALMAH. Z, SE

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Data dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

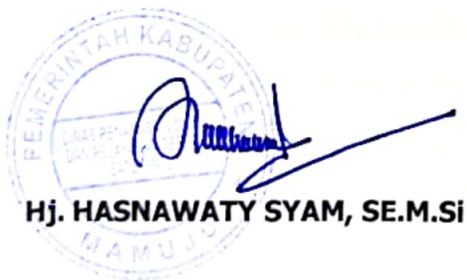

Hj. SALMAH. Z, SE

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
BIDANG INFORMASI DATA DAN PELAPORAN
KABUPATEN MAMUJU

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya Iklim yang Kondusif untuk Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal	100 %
2	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase laporan data base perizinan dan non perizinan	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 10.000.000,00	APBD
1	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.000.000,00	APBD
III	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 47.377.000,00	APBD
3	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 47.377.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 57.377.000,00	

Kepala DPM-PTSP,



Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Mamuju, Januari 2023

Kepala Bidang Informasi data
dan Pelaporan



Hj. SALMAH. Z, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIS**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si


H. MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
SEKRETARIS**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Target Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Secara Akuntabel	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Program Penujang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 3.217.692.132,00	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.978.640,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 2.713.871.392,00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 3.428.000	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 3.464.000,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 131.087.600,00	APBD
5	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 13.580.000,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 309.480.000,00	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 34.802.500,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 3.217.692.132,00	

Mamuju, Januari 2023

Sekretaris

Kepala DPM-PTSP,


HJ. HASNAWATY SYAM, SE.M.SI


H. MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASTURA, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASLIAH, SE

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

HASLIAH, SE

Pihak Pertama,

MASTURA, SE

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100%
1	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen
II	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	75 %
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 23.826.000,00	APBD
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.826.000,00	APBD
II	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 414.933.200,00	APBD
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 414.933.200,00	APBD
	Jumlah	Rp. 438.759.200,00	

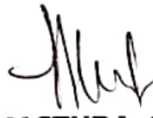
Kepala Bidang



HASLIAH, SE

Mamuju, Januari 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda



MASTURA, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYARIFUDDIN L, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASLIAH, SE

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

HASLIAH, SE

Pihak Pertama,

SYARIFUDDIN L, SE

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti	33%
1	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.000.000,00	APBD
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp. 2.000.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 2.000.000,00	

Kepala Bidang,


HASLIAH, SE

Mamuju, Januari 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda


SYARIFUDDIN L, SE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALI, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASLIAH, SE

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

HASLIAH, SE

Pihak Pertama,

ALI, SE

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	75 %
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Kegiatan Usaha

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RP. 117.166.800	APBD
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	RP. 117.166.800	
	Jumlah	Rp. 117.166.800	

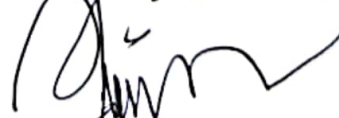
Kepala Bidang,



HASLIAH, SE

Mamuju, Januari 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda



ALI, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASTRINA S.Kom

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDIR, S.Pi. M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Selaku atasan langsung pihak pertama

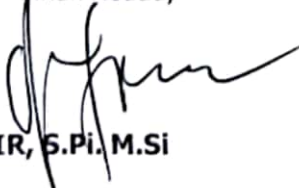
selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,


SUDIR, S.Pi. M.Si

Pihak Pertama,


ASTRINA S.Kom

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100 %
1	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelakun Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	90 Pelaku Usaha

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 36.060.600,00	APBD
1	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 36.060.600,00	APBD
	Jumlah	Rp. 36.060.600,00	

Kepala Bidang,



SUDIR, S.Pi. M.Si

Mamuju, Januari 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda



ASTRINA S.Kom

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.TAUFIQ, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDIR, S.Pi. M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Selaku atasan langsung pihak pertama

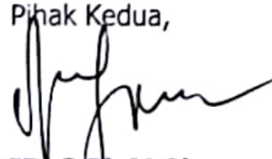
selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,


SUDIR, S.Pi. M.Si

Pihak Pertama,

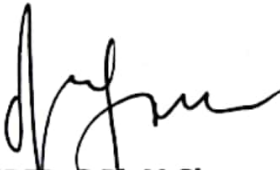

M.TAUFIQ, SE

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100%
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10 Kegiatan Usaha
II	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	100 %
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Kegiatan Usaha

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.180.000,00	APBD
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp. 3.180.000,00	APBD
II	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.899.200,00	APBD
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 14.899.200,00	APBD
	Jumlah	Rp. 18.079.200,00	

Kepala Bidang,


SUDIR, S.Pi. M.Si

Mamuju, Januari 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda


M.TAUFIQ, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BACHTIAR, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Jabatan : Kepala Bidang Monitoring Dan Evaluasi

Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Hj. MISNAWATI, B.ST.MM


BACHTIAR, SE

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	100%
1	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.880.000,00	APBD
1	Pengolahan Data, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 17.880.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 17.880.000,00	

Mamuju, Januari 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Kepala Bidang,



HJ. MISNAWATI, B.ST.MM



BACHTIAR, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RASLIM, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Jabatan : KEPALA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjut nya di sebut pihak kedua

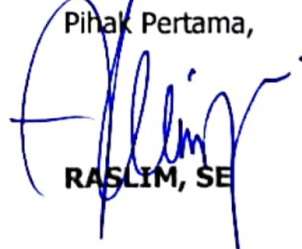
Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Pihak Pertama,

RASLIM, SE

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Perizinan Umum Terlayani dengan online	100 %
1	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	24 Orang

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.257.800,00	APBD
1	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 5.257.800,00	APBD
	Jumlah	Rp. 5.257.800,00	

Kepala Bidang,



Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Mamuju, Januari 2023

Analisis Kebijakan



RASLIM, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAIFA MUSDHALIFAH, M.S.I.Kom

Jabatan : Analis Ahli Kebijakan Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Jabatan : Kepala Bidang Monitoring Dan Evaluasi

Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya di sebut pihak kedua

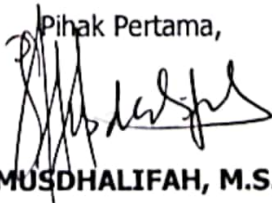
Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Pihak Pertama,

MAIFA MUSDHALIFAH, M.S.I.Kom

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100 %
1	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.899.200,00	APBD
1	Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Rp. 14.899.200,00	APBD
	Jumlah	Rp. 14.899.200,00	

Mamuju, Januari 2023

Kepala Bidang,

HJ. MISNAWATI, B.ST.MM

Analisis Kebijakan Ahli Muda


MAIFA MUSDHALIFAH, M.S.I.Kom

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG INFORMASI DATA DAN PELAPORAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDHAM KADIR, S.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HJ. SALMAH Z, SE

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Data Dan Pelaporan

Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HJ. SALMAH Z, SE

IDHAM KADIR, S.Si

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tersedianya penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	100%
1	Ditetapkannya kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudaha Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen
II	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	100%
2	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen

2	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen
---	---	--	------------

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.000.000,00	APBD
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp. 10.000.00,00	APBD
II	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 29.497.000,00	APBD
2	Pengolahan Data, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 29.497.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 39.497.000,00	

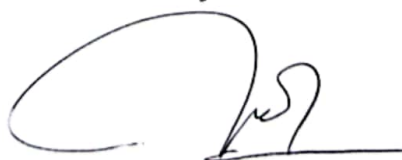
Kepala Bidang,



HJ. SALMAH Z, SE

Mamuju, Januari 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda



IDHAM KADIR, S.Si

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIATI, S.IP

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

HARIATI, S.IP

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
BAGIAN SEKRETARIAT

KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
3	Tersedianya Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen

	Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
5	Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen
6	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.978.640,00 .	APBD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 731.560,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.643.400,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Rp. 1.458.000,00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 928.000,00	APBD
5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 734.800,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.212.040,00	APBD
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.270.840,00	APBD
	Jumlah	Rp 7.978.640,00 .	

Sekretaris,



H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Mamuju, Januari 2023

Kasubag Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan



HARIATI, S.IP

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURLAELAH, ST

Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

NURLAELAH, ST

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
BAGIAN SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
1	Tersedianya Data Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen
II	Tersedianya dokumen pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
III	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100%

1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit
2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit
IV	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
2	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan
V	Terwujudnya Pelayanan Administras umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %

1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket
2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
3	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 3.464.000,00	APBD
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 3.464.000,00	APBD
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 3.428.000,00	APBD
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 3.428.000,00	APBD
III	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 34.802.500,00	APBD
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Rp. 28.852.500,00	APBD

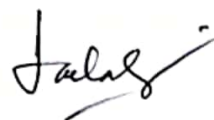
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 5.950.000,00	APBD
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 309.480.000,00	APBD
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 200.280.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 28.800.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 80.400.000,00	APBD
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 131.087.600,00	APBD
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 4.287.600,00	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 1.584.000,00	APBD
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 125.216.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 482.262.100,00	

Sekretaris,



H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Mamuju, Januari 2023
Kasubag Umum dan Kepegawaian



NURLAELAH, ST

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT, SE

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Pihak Pertama,

RAHMAT, SE

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
I	Tersedianya dokumen pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/Bulan
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.713.871.392,00	APBD
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.646.555.244,00	APBD
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	RP. 50.528.000,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran / SKPD	RP. 16.788.148,00	APBD
	Jumlah	Rp. 2.713.871.392,00	

Sekretaris,



H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Mamuju, Januari 2023
 Analis Keuangan Pusat dan
 Daerah Ahli Muda



RAHMAT, SE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PERIZINAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMMI AISYAH, S

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDIR, S.Pi.M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SUDIR, S.Pi.M.Si

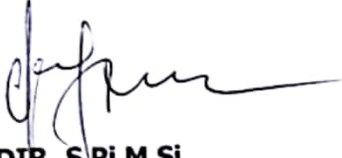
UMMI AISYAH, S

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENGADMINISTRASIAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100%
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10 Kegiatan Usaha
II	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	100 %

1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Kegiatan Usaha
---	--	---	-------------------

Kepala Bidang Perizinan


SUDIR, S.Pi.M.Si

Mamuju, Januari 2023
 Pengadministrasian Umum


UMMI AISYAH, S

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PERIZINAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZKI ADE PUTRA

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDIR, S.Pi.M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan

Selaku atasan langsung pihak pertama

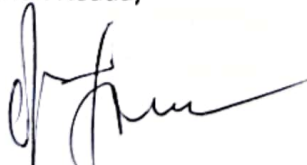
Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,


SUDIR, S.Pi.M.Si

Pihak Pertama,

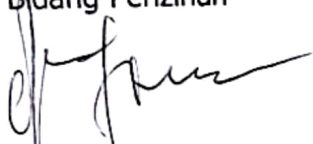

REZKI ADE PUTRA

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENGADMINISTRASIAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100%
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10 Kegiatan Usaha
II	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	100 %

1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Kegiatan Usaha
---	--	---	-------------------

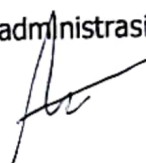
Kepala Bidang Perizinan



SUDIR, S.Pi.M.Si

Mamuju, Januari 2023

Pengadministrasian Umum



REZKI ADE PUTRA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. HILMI

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASLIAH, SE

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

HASLIAH, SE

Pihak Pertama,

MUH. HILMI

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENGADMINISTRASIAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	75 %
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Kegiatan Usaha

Analisis Kebijakan Ahli Muda


HASLIAH, SE

Mamuju, Januari 2023
 Pengadministrasian Umum


MUH. HILMI

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDULLAH MANDASINI, S.M

Jabatan : Analis Kerjasama dan Permodalan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASLIAH, SE

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HASLIAH, SE

Mamuju, Januari 2023

Pihak Pertama,

ABDULLAH MANDASINI, S.M

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KERJASAMA DAN PERMODALAN

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100%
1	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen
II	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	75 %
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha

Kepala Bidang Penanaman Modal



HASLIAH, SE

Mamuju, Januari 2023

Analisis Kerjasama dan Permodalan



ABDULLAH MANDASINI, S.M

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURLY ASTRINI M. PULU, S.M

Jabatan : Analis Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASLIAH, SE

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

HASLIAH, SE

Pihak Pertama,

NURLY ASTRINI M. PULU, S.M

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS PENANAMAN MODAL

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti	33%
1	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kepala Bidang Penanaman Modal



HASLIAH, SE

Mamuju, Januari 2023

Analisis Penanaman Modal



NURLY ASTRINI M. PULU, S.M

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIDIAWATY, SE

Jabatan : Analis Pengaduan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Jabatan : Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi

Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Pertama,

SIDIAWATY, SE

Pihak Kedua,

Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Perizinan Umum Terlayani dengan online	100 %
1	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	24 Orang

Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi



Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Mamuju, Januari 2023

Analisis Pengaduan Masyarakat



SIDIAWATY, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAPIKA ASNITA, SE

Jabatan : Analis Pengaduan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Jabatan : Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi

Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Pihak Pertama,

RAPIKA ASNITA, SE

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Perizinan Umum Terlayani dengan online	100 %
1	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	24 Orang

Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi


Hj. MISNAWATI, B.ST.MM

Mamuju, Januari 2023

Analisis Pengaduan Masyarakat


RAPIKA ASNITA, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IVANA, SE

Jabatan : Analis Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Jabatan : Sekretaris DPM-PTSP

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Mamuju, Januari 2023

Pihak Pertama,

IVANA, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IVANA, SE

Jabatan : Analis Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Jabatan : Sekretaris DPM-PTSP

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Mamuju, Januari 2023

Pihak Pertama,

IVANA, SE

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
ANALIS KEUANGAN

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
I	Tersedianya dokumen pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/Bulan
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan

Sekretaris DPM-PTSP



H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Mamuju, Januari 2023

Analisis Keuangan



IVANA, SE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUJADI LENDANG, A.Md

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Jabatan : Sekretaris DPM-PTSP

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Mamuju, Januari 2023

Pihak Pertama,

SUJADI LENDANG, A.Md

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
BENDAHARA PENGELUARAN

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
I	Tersedianya dokumen pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/Bulan
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan

Sekretaris DPM-PTSP



H.MUHAMMAD IBRAHIM, ST.MM

Mamuju, Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



SUJADI LENDANG, A.Md

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG INFORMASI DATA DAN PELAPORAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURLANENGSIH

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. SALMAH. Z, SE

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Data dan Pelaporan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

Hj. SALMAH. Z, SE

Pihak Pertama,

MURLANENGSIH

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENGADMINISTRASIAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tersedianya penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	100%
1	Ditetapkannya kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen
II	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	100%
2	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	12 Dokumen

	Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	
--	--	--	--

Kepala Bidang Informasi
Data dan Pelaporan


Hj. SALMAH. Z, SE

Mamuju, Januari 2023
Pengadministrasian Umum


MURLANENGSIH

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. ICHA A

Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURLAELAH, ST

Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung pihak pertama

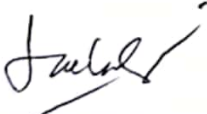
Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,


NURLAELAH, ST

Pihak Pertama,


Hj. ICHA A

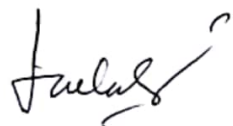
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
BAGIAN SEKRETARIAT
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
1	Tersedianya Data Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen
II	Tersedianya dokumen pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
III	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100%

1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit
2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit
IV	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
2	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan
V	Terwujudnya Pelayanan Administras umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %

1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket
2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
3	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan

Kasubag Umum dan Kepegawaian



NURLAELAH, ST

Mamuju, Januari 2023

Pengadministrasi Kepegawaian



Hj. ICHA A

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PERIZINAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. KASIM

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDIR, S.Pi.M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan

Selaku atasan langsung pihak pertama

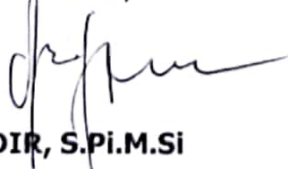
Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,


SUDIR, S.Pi.M.Si

Pihak Pertama,


MUH. KASIM

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENGADMINISTRASIAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100%
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10 Kegiatan Usaha
II	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	100 %

1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Kegiatan Usaha
---	--	---	-------------------

Kepala Bidang Perizinan



SUDIR, S.Pi.M.Si

Mamuju, Januari 2023
Pengadministrasian Umum



MUH. KASIM

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI GANTI WIDYAHWATI

Jabatan : Pengadministrasi Persuratan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURLAELAH, ST

Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2023

Pihak Kedua,

NURLAELAH, ST

Pihak Pertama,

SRI GANTI WIDYAHWATI

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
BAGIAN SEKRETARIAT
PENGADMINISTRASI PERSURATAN

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
1	Tersedianya Data Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen
II	Tersedianya dokumen pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
III	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100%

1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit
2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit
IV	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
2	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan
V	Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %

1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket
2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
3	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan

Kasubag Umum dan Kepegawaian


NURLAELAH, ST

Mamuju, Januari 2023
 Pengadministrasi Persuratan


SRI GANTI WIDYAHWATI